



Article Informations
Corresponding Email:
almaareila90@gmail.com

Received: 06/08/2024; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA MENGENAI SEKTOR KELAPA SAWIT TAHUN 2023

Alma Areila Hasna

1)Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menganalisis data dari sumber-sumber primer kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, meliputi: implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, pengembangan sistem ketertelusuran seperti Dasbor Nasional dan Dashboard Komoditas, partisipasi dalam Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, serta pengajuan pendekatan pertukaran praktik terbaik antar komoditas. Kesimpulannya, Indonesia mengadopsi pendekatan proaktif dan komprehensif dalam menghadapi European Union Deforestation Regulation, dengan fokus pada peningkatan transparansi, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit nasional, sambil mempertahankan posisinya sebagai produsen utama kelapa sawit dunia. Upaya-upaya ini mencerminkan strategi Indonesia dalam mengubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan di sektor kelapa sawit.

Kata Kunci: European Union Deforestation Regulation, Kelapa Sawit, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian Government's efforts in addressing the European Union's deforestation-free policy on palm oil. The research employs a qualitative method, analyzing data from credible primary sources. The results show that the Indonesian Government has taken strategic steps, including: implementing the National Action Plan for Sustainable Palm Oil (RAN-KSB), developing traceability

systems such as the National Dashboard and Commodity Dashboard, participating in the Ad Hoc Joint Task Force on EUDR, and proposing an approach for exchanging best practices across commodities. In conclusion, Indonesia adopts a proactive and comprehensive approach in facing the European Union Deforestation Regulation (EUDR), focusing on enhancing transparency, sustainability, and competitiveness of the national palm oil industry, while maintaining its position as the world's leading palm oil producer. These efforts reflect Indonesia's strategy to transform challenges into opportunities for innovation and improvement in the palm oil sector.

Keywords: European Union Deforestation Regulation, Palm Oil, Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan baru di pasar internasional, terutama dari Uni Eropa (UE). Meskipun UE merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Pada pertengahan tahun 2023, Uni Eropa mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah deforestasi global dengan memberlakukan peraturan baru yang dikenal sebagai *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR). Peraturan ini, yang mulai berlaku pada 16 Mei 2023, bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap penggundulan hutan.

EUDR mewajibkan para eksportir untuk memberikan bukti bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. Kebijakan ini mencakup beberapa komoditas utama yang sering dikaitkan dengan deforestasi, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, kayu, dan produk peternakan. Deforestasi, yakni berkurangnya luas area hutan, telah menjadi masalah lingkungan global yang krusial. Fenomena ini terjadi akibat berbagai aktivitas manusia, termasuk pembangunan pemukiman, infrastruktur, pertambangan, serta ekspansi lahan pertanian dan perkebunan (European Commission, 2021). Salah satu dampak serius dari deforestasi adalah kontribusinya terhadap pemanasan global, terutama melalui kebakaran hutan yang sering terjadi sebagai metode pembukaan lahan.

Regulasi ini secara langsung memengaruhi beberapa komoditas unggulan Indonesia yang selama ini menjadi andalan ekspor ke pasar Eropa. Produk-

produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu, yang merupakan tulang punggung ekspor Indonesia ke Uni Eropa, kini menghadapi tantangan baru untuk memenuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat (European Commission, 2021). Situasi ini menuntut adanya penyesuaian dalam praktik produksi dan pengelolaan rantai pasokan di Indonesia. Para produsen dan eksportir Indonesia harus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi persyaratan baru ini, yang meliputi pembuktian bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi.

Meskipun EUDR memiliki tujuan mulia, regulasi ini telah memicu berbagai kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk negaranegara penghasil komoditas yang diatur dalam ketentuan tersebut. Kritik utama berfokus pada proses pembuatan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan negara-negara produsen komoditas seperti kayu, sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan ternak. Banyak pihak merasa bahwa EUDR tidak cukup mempertimbangkan kondisi lokal, terutama dampaknya terhadap petani kecil.

Implementasi EUDR diperkirakan akan berdampak signifikan pada berbagai sektor ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Kerugian terbesar diperkirakan akan dialami oleh sektor lemak nabati, binatang, dan produk turunannya, dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar US\$3,15 miliar. Sektor karet dan produk turunannya juga akan terkena dampak besar, dengan perkiraan kerugian mencapai US\$0,93 miliar. Industri kayu dan produk turunannya berpotensi kehilangan US\$0,39 miliar, sementara sektor kopi, teh, dan produk turunannya diperkirakan akan kehilangan US\$0,37 miliar. Sektor kertas, karton, dan produk turunan kayu juga tidak luput dari dampak, dengan potensi kerugian sebesar US\$0,3 miliar (Rasbin, 2023).

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi penerapan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, telah mengambil langkah proaktif untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Pada Mei 2023, Indonesia dan Malaysia melakukan misi diplomatik bersama ke Brussel, pusat pemerintahan Uni Eropa. Tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk berdialog langsung dengan para pembuat kebijakan di Komisi Eropa dan anggota Parlemen Uni Eropa yang

terlibat dalam perumusan EUDR. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia-Malaysia menyampaikan keberatan mereka terhadap regulasi ini dan menjelaskan potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika EUDR diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus negara produsen. Inisiatif bersama ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam melindungi kepentingan industri sawit mereka, yang merupakan sektor ekonomi yang sangat penting. Langkah ini juga mencerminkan upaya diplomatis untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan produsen sawit sekaligus memenuhi tujuan keberlanjutan lingkungan yang diusung oleh Uni Eropa.

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini akan menganalisa melalui penafsiran akan fenomena yang telah terjadi pada rentan waktu yang telah ditentukan. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah berusaha menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer untuk menemukan prinsip-prinsip, hukum-hukum, dalil-dalil, teori, maupun generalisasi yang berlaku umum mengenai gejala sosial (*social phenomena*) dan kenyataan sosial (*social facts*) yang diteliti. Penelitian ini akan banyak menggunakan sumber-sumber primer yang kredibel dalam menjawab terhadap rumusan masalah. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terencana. Kegiatan ini melibatkan penelaahan berbagai informasi yang telah dikumpulkan, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan lainnya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap semua informasi yang telah dihimpun. Lebih lanjut, analisis data juga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyajikan temuan-temuan mereka dengan cara yang jelas dan bermakna. Dengan kata lain, analisis data adalah langkah krusial yang membantu mengubah kumpulan informasi mentah menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat

dipahami. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data menurut metode penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, dengan memperkuat argumen yang didasari dengan penggunaan bahan referensi untuk membuktikan pengumpulan data. Pengujian data melalui cara triangulasi, dengan memperoleh data menggunakan metode yang berbeda dan dapat menghasilkan kesimpulan. Selain itu, pengujian keabsahan data dapat melalui bahan referensi, yang mana menggunakan bahan referensi menjadi pengujian keabsahan data yang telah dilakukan analisa oleh peneliti. Dapat berupa dokumen-dokumen yang memiliki kredibilitas data sehingga data dapat dipercaya dan meminimalisir kekeliruan.

PEMBAHASAN

Industri kelapa sawit telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan devisa negara. Sektor ini mampu menghasilkan devisa sebesar Rp239,4 triliun, suatu pencapaian yang sulit ditandingi oleh sektor industri lainnya di Indonesia.(Sawit BPDPKS 2018) Angka ini menunjukkan betapa strategisnya posisi industri kelapa sawit dalam struktur ekonomi nasional. Kontribusi yang begitu besar ini tidak hanya memperkuat cadangan devisa negara, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Dampak positif industri sawit terasa di berbagai sektor, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur di daerahdaerah terpencil, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Industri perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam jangka panjang, mencerminkan peningkatan permintaan global yang signifikan. Tren ini menggambarkan perubahan pola konsumsi minyak nabati di seluruh dunia, dengan minyak sawit menjadi pilihan utama karena efisiensi dan versatilitasnya. Indonesia memainkan peran kunci sebagai pemimpin global dalam produksi kelapa sawit. Indonesia diproyeksikan akan mempertahankan posisinya sebagai produsen terbesar di dunia dengan produksi mencapai 33,5 juta ton.(Sawit BPDPKS, 2018) Dominasi Indonesia dalam pasar global kelapa sawit tidak hanya

menunjukkan keberhasilan negara dalam mengembangkan sektor ini, tetapi juga menegaskan peran strategisnya dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Posisi ini memberi Indonesia peluang besar untuk terus mengoptimalkan potensi ekonominya, dengan menghadapi tantangan untuk mengelola industri ini secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai salah satu produsen utama kelapa sawit dunia memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan potensi dampaknya terhadap prinsip-prinsip World Trade Organization (WTO). Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang signifikan dalam perdagangan global komoditas ini. Penerapan EUDR yang secara spesifik menargetkan minyak sawit, tanpa mencakup minyak nabati lainnya, berpotensi memberikan dampak negatif yang besar terhadap industri kelapa sawit Indonesia.

Posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit dunia membuat negara ini sangat rentan terhadap potensi pelanggaran prinsip Most Favored Nation (MFN) dan National Treatment (NT) yang diakibatkan oleh EUDR. Kebijakan ini dapat dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit Indonesia, sementara minyak nabati lain, termasuk yang diproduksi di Uni Eropa, tidak menghadapi regulasi yang sama ketatnya. Hal ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi WTO, tetapi juga dapat secara langsung merugikan ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor minyak sawit.

Persyaratan "bebas deforestasi" dan mekanisme pembuktian yang rumit dalam EUDR dapat menjadi hambatan non-tarif yang signifikan bagi ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Ini dapat mengancam akses pasar Indonesia ke salah satu pasar utama minyak sawitnya, yang pada gilirannya dapat berdampak serius pada ekonomi nasional dan kesejahteraan jutaan petani kecil yang bergantung pada industri ini. Situasi ini menegaskan bahwa Indonesia, sebagai produsen utama, memiliki kepentingan yang kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil yang dijunjung oleh WTO, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi

kepentingan lingkungan tanpa mengorbankan akses pasar yang setara bagi produk-produk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang berlaku dari 2019 sampai 2024. (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, n.d.) Rencana ini memiliki lima sasaran utama yang saling terkait. Pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petani kelapa sawit. Kedua, menyelesaikan masalah status dan legalitas lahan perkebunan. Ketiga, mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Keempat, memperkuat upaya diplomasi untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Terakhir, mempercepat proses mewujudkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan.

Program-program yang dicanangkan dalam RAN-KSB memiliki relevansi tinggi dengan persyaratan legalitas perkebunan yang ditetapkan oleh European Union Deforestation Regulation (EUDR). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RAN-KSB dapat secara signifikan mendukung upaya Indonesia dalam memenuhi standar internasional untuk ekspor produk kelapa sawit. RAN-KSB tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan kelapa sawit internasional, khususnya di pasar Uni Eropa. Inpres ini tidak hanya berfokus pada level nasional, tetapi juga mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Indonesia memiliki potensi signifikan dalam mendukung pemenuhan aspek ketertelusuran yang disyaratkan oleh European Union Deforestation Regulation (EUDR). Hal ini tercermin dalam dua program utama RANKSB yaitu, penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit dan percepatan pembentukan serta penguatan kelembagaan pekebun. Program penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit memiliki peran krusial dalam memenuhi persyaratan EUDR, terutama dalam hal penyediaan informasi geolokasi lahan Perkebunan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia (2024). Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa langkah strategis Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan industri sawit nasional dengan tuntutan global, khususnya kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa. Melalui RAN KSB, Indonesia berupaya membuktikan komitmennya terhadap praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dasbor Nasional Indonesia adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketertelusuran dan transparansi berbagai komoditas, termasuk kelapa sawit, karet, kakao, kayu, dan kopi. Ditjenbun (2024). Dasbor ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Indonesia untuk memenuhi standar dan peraturan keberlanjutan internasional, seperti Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Dasbor Nasional mengintegrasikan data dari berbagai pemangku kepentingan di sektor komoditas ini untuk memastikan ketertelusuran dan geolokasi yang akurat, dapat diandalkan, dan tidak dapat diubah. Sistem ini membantu memantau kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dan standar lingkungan, sehingga mendukung komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan membantu petani kecil untuk sejalan dengan peraturan internasional. Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan upaya Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) dan kolaborasi internasional lainnya untuk meningkatkan keberlanjutan dan legalitas ekspor komoditas Indonesia.

Traceability Tools atau alat ketertelusuran merupakan komponen krusial dalam memenuhi persyaratan European Union Deforestation Regulation (EUDR) (Ditjenbun, 2024). Dashboard Komoditas memainkan peran sebagai sistem utama yang menyediakan ketertelusuran komprehensif untuk komoditas terkait EUDR. Dashboard ini mengintegrasikan data dan informasi dari hulu hingga hilir, memanfaatkan sumber data dari e-STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) untuk pekebun dan Siperibun untuk perusahaan. Dengan menggabungkan informasi dari kedua sistem tersebut, Dashboard Komoditas menciptakan gambaran lengkap tentang rantai pasok, mulai dari asal usul produk hingga proses pengolahan dan distribusinya. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap praktik produksi

berkelanjutan dan membantu memastikan kepatuhan terhadap standar EUDR.

Pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force on EUDR* merupakan hasil dari serangkaian pertemuan diplomatik antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa (Joint Press Release: The 2nd Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR (2024)). Inisiatif ini dimulai setelah kunjungan bersama Indonesia dan Malaysia ke Brussels pada akhir Mei 2023, yang kemudian diikuti oleh kunjungan balasan Komisi Eropa ke kedua negara pada Juni 2023. Task Force ini dirancang sebagai forum konsultasi yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara ketiga pihak terkait implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Tujuan utamanya adalah menciptakan pemahaman bersama mengenai regulasi ini dan dampaknya terhadap negaranegara produsen. Dengan adanya platform ini, Indonesia dan Malaysia memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka, sementara Uni Eropa dapat menjelaskan ekspektasi dan standar yang ditetapkan dalam EUDR.

Meskipun kebijakan EUDR (European Union Deforestation Regulation) berpotensi menghambat ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa, Indonesia mengambil sikap yang konstruktif dan berorientasi pada solusi. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa kerjasama merupakan jalan keluar terbaik dalam menghadapi tantangan ini. Indonesia mengusulkan pendekatan yang berfokus pada pertukaran dan implementasi praktik terbaik untuk setiap komoditas yang terdampak. Dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan di berbagai sektor komoditas, Indonesia berharap dapat menginspirasi solusi yang saling menguntungkan.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar EUDR, tetapi juga untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, Indonesia berusaha mengubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan dalam industri kelapa sawit dan komoditas lainnya. Sikap ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi positif dalam perdagangan global

dengan menjaga kelestarian lingkungan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan dengan bersamaan.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa mengenai kelapa sawit, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan yang proaktif dan komprehensif. Langkah-langkah strategis yang diambil mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan keberlanjutan global. Implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) menjadi landasan utama dalam upaya ini, diikuti dengan pengembangan sistem ketertelusuran seperti Dasbor Nasional dan Dashboard Komoditas. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memenuhi standar European Union Deforestation Regulation (EUDR). Selain itu, partisipasi Indonesia dalam Ad Hoc Joint Task Force on EUDR bersama Malaysia dan Uni Eropa menunjukkan kesediaan untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Meskipun menghadapi potensi dampak negatif dari EUDR terhadap industri kelapa sawit nasional, Indonesia mengambil sikap konstruktif dengan mengusulkan pertukaran praktik terbaik antar komoditas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan EUDR, tetapi juga untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global. Upaya-upaya ini mencerminkan strategi Indonesia dalam mengubah tantangan menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan, sambil tetap mempertahankan posisinya sebagai produsen utama kelapa sawit dunia.

REFERENSI

Anisa Oktariyanti, R., & Syaprin Zahidi, M. (2024). Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Timber Indonesia). *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 03(01).

Corona, P., Di Stefano, V., & Mariano, A. (2023). Knowledge gaps and research opportunities in the light of the European Union Regulation on deforestation-free products. *Annals of Silvicultural Research*, 48(2), 87–89. <https://doi.org/10.12899/asr-2445>

Ditjenbun. (2024, February 7). Pemerintah Indonesia Dorong Dashboard Komoditas Sebagai Alat Ketertelusuran yang Terintegrasi. *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan*. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pemerintah-indonesia-dorong-dashboard-komoditas-sebagai-alat-ketertelusuran-yang-terintegrasi/>

European Commission. (2021). *European Commission-Questions and answers Questions and Answers on new rules for deforestation-free products*.

Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. (2024). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5699/gelar-rapat-koordinasi-nasional-pemerintah-lanjutkan-rencana-aksi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan>

Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). KONFLIK INDONESIA DENGAN UNI EROPA (UE) DAN DAMPAKNYA TERHADAP POSISI KEANGGOTAAN INDONESIA DI PARIS AGREEMENT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 595–606. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>

Itoh Viergever, T. T. (n.d.). *Opinion-The EU's Regulation on Deforestation-Free Products and its Malcontents*. <https://www.e-ir.info/2024/05/19/opinion-the-eus-regulation-on-deforestation-free-products-and-its-malcontents/>

Joint Press Release: The 2nd Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR. (2024, February 2). *European Union*. https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/joint-press-release-2nd-meeting-ad-hoc-joint-task-force-eudr_en?s=168

- Lia, H. I., & Cattleyana, D. (n.d.). ECONOMIC IMPACTS OF THE EU'S ANTI DEFORESTATION LAW ON INDONESIA. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM)*. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim>
- Rasbin. (2023). DAMPAK UU ANTI DEFORESTASI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA. In *Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://puslit.dpr.go.id>
- Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan*. (n.d.). Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Retrieved July 29, 2024, from <https://sekretariat-ranksb.id/rencana-aksi-nasional>
- Sawit Indonesia, Sepenting Apa? (2018, May 2). *Sawit BPDPKS*. <https://www.bpdp.or.id/sawit-indonesia-sepenting-apa>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). ANALISIS PANGSA PASAR DAN DAYA SAING CPO INDONESIA DI UNI EROPA. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 18(2).

(Anisa Oktariyanti & Syaprin Zahidi, 2024; Corona et al., 2023; Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022; Itoh Viergever, n.d.; Lia & Cattleyana, n.d.; Wahyuni & Suranto, 2021; Widyaningtyas & Widodo, 2016)